

PERBANASNews

No. 147 Tahun XXXIX April-September 2022

**Strategi Turn Around
Setelah Dihantam Pandemi**

**Alarm Pembiayaan Bank
Dari Sektor Properti**



TIGA PIJAKAN PENJAGA INDONESIA

Di masa pemulihan pasca-pandemi, pemerintah berharap kepada industri perbankan nasional terkait tiga hal: kredit jangka menengah panjang untuk UMKM, mendukung produk dalam negeri, dan transisi menuju green economy.

PERBANASNews



PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Wakil Ketua Umum

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Wakil Sekretaris Jenderal

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

P

uji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Majalah PERBANASNews edisi pertama dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan majalah ini.

Pada 2022 Perbanas melakukan transformasi pada Majalah *PROBANK* menjadi PERBANASNews.

Perubahan nama ini bertujuan meningkatkan *branding* dan citra Perbanas. PERBANASNews merupakan sarana dan wadah berbagi informasi bagi bank-bank anggota Perbanas untuk kemajuan organisasi maupun industri.

PERBANASNews menyuguhkan berbagai rubrik terbaru yang menarik. Di antaranya, Pojok Asosiasi yang berisi informasi, kegiatan, serta opini ketua umum asosiasi yang menjadi afiliasi Perbanas, seperti Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), serta *outlook* kinerja perbankan (triwulan). Rubrik lainnya adalah tentang perkembangan sistem pembayaran dan analisis mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas. PERBANASNews edisi pertama menyajikan pandangan M. Chatib Basri terkait dengan perkembangan ekonomi makro dan industri perbankan.

Untuk menjangkau segmentasi pembaca yang lebih luas, PERBANASNews dapat diakses dalam bentuk digital yang dapat diunduh secara gratis oleh semua kalangan melalui *website* www.perbanas.org.

Para pembaca budiman, peran perbankan dalam implementasi bisnis hijau (*green business*) merupakan strategi pembangunan berkelanjutan. Indonesia mendesak untuk melakukan revolusi industri hijau karena menipisnya sumber daya energi untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga serta tingginya emisi CO2. Dukungan industri perbankan melalui *green banking* dalam berkontribusi aktif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan perangkat hukum, penyediaan informasi, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi, serta penelitian bersama.

Bank harus memperhatikan *triple bottom line*, yaitu konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan tiga kriteria, yaitu *people* (sosial), *planet* (lingkungan), dan *profit* (ekonomi). Selain itu, mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.

Perbanas mendukung upaya tersebut dengan menjadi jembatan antara regulator dan masyarakat dengan para pelaku industri perbankan. Perbanas berpartisipasi dalam *side event* G20 "Scaling Up the Utilisation of Sustainable Finance Instruments" tahun 2022. Partisipasi kegiatan ini menunjukkan komitmen institusi keuangan di Indonesia untuk mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dengan memperhatikan kriteria *environmental, social, dan governance (ESG)*.

Akhir kata, kami berharap PERBANASNews dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Kartika Wirjoatmodjo,
Ketua Umum Perbanas





PERBANAS UTAMA

Tiga Harapan Pemerintah kepada Pelaku Perbankan

Di masa pemulihan pascapandemi, pemerintah berharap dukungan pelaku perbankan nasional terkait dengan tiga hal ini: kredit jangka menengah panjang untuk UMKM, penggunaan produk dalam negeri, dan transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*).

OPINI BANKIR

Strategi Turn Around Setelah Dihantam Pandemi | 6

Bank-bank bermodal kuat lebih cepat *turnaround* kinerjanya. Efek pandemi masih terasa di bank-bank kecil, kendati ekonomi nasional mulai membaik. Berlomba meningkatkan dana murah dan membangun ekosistem digital.

INDIKATOR

Alarm Pembiayaan Bank dari Sektor Properti | 8



Taksonomi Hijau ASEAN Potensi dan Dampak Perbankan | 10

Negara-negara di kawasan ASEAN rentan terhadap perubahan iklim, meski di lain sisi menawarkan potensi besar bagi pembiayaan berkelanjutan. Taksonomi hijau diharapkan mampu mendatangkan investasi global yang lebih besar dan ramah lingkungan di kawasan ini.

Pasca-Laporan BPK BI Terus Benahi BI Fast | 12

REGULASI

OJK Rilis Aturan Baru Biro Kredit Partikelir | 13

INTERNASIONAL

Bintang Vietnam di Ekonomi Digital Asia Tenggara | 14

Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan paling kencang di dunia. Negara ini memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik dengan Indonesia. Vietnam sedang menjadi "bintang" yang mengangkasa di langit Asia Tenggara.



POJOK ASOSIASI

RUA Perbanas 2022 Sahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 | 16

Program IBI Hadapi Tantangan dan Peluang Baru di Tahun 2023 | 18

Bankir dari Tiga Asosiasi Gelar Donor Darah | 19

Setelah vakum sejak pandemi Covid-19, IBI kembali menggelar aksi sosial bertajuk #YUKDONORDARAH. Ada 500 lebih bankir yang datang untuk berdonor darah serta memberikan donasi ke PMI.



Perbanas, Aftech, dan Kadin Sepakat Percepat Inklusi Keuangan | 20

WACANA

Aturan Spin Off UUS Menanti Ketok Palu | 21

RESENSI BUKU

The Psychology of Money: Soft Skill Mengelola Uang | 22

RESENSI BUKU

Perajin Perak di Ceruk dan Transformasi Ekonomi Bali | 24

SUPEMEN

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih - Bank Banten | 17

Tiga Harapan Pemerintah kepada Pelaku Perbankan



Di masa pemulihan pascapandemi, pemerintah berharap dukungan pelaku perbankan nasional terkait dengan tiga hal ini: kredit jangka menengah panjang untuk UMKM, penggunaan produk dalam negeri, dan transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*).

J

UNI 2022. The Global Crisis Response Group (GCRG), bentukan Sekjen PBB, Antonio Guterres, melaporkan, sejumlah negara kini berada di tebing jurang krisis. Selain Sri Lanka, yang sudah lebih dulu bangkrut akibat gagal bayar (*default*) utang luar negeri, sembilan negara kini juga diperkirakan bakal mengalami hal yang sama seperti Sri Lanka. Kesembilan negara tersebut adalah Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe.

Saat ini, kesembilan negara tersebut juga sudah empot-empotan. Krisis pangan, energi, dan keuangan mendera mereka. Penyebabnya bervariasi. Mayoritas dipicu oleh pandemi COVID-19, yang menghentikan aktivitas bisnis, kegiatan pariwisata, dan membuat utang menumpuk. Hal itu makin diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, yang melambungkan harga bahan bakar minyak dan memicu inflasi global.

Beruntung, Indonesia tidak masuk dalam daftar negara "duaafa" tersebut. Bahkan, Sekjen PBB, Antonio Guterres, sangat mengapresiasi ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dari keputusannya mempercayakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai anggota Champion Group of GCRG, bersama lima petinggi negara lainnya: Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh.

Presiden RI layak mendapat kehormatan itu. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil mengatasi pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan ekonomi tetap positif di angka 5,44% dan angka inflasi yang terkendali di 4,9%, jauh di bawah rata-rata inflasi Asia yang di kisaran 7% dan inflasi negara-negara maju di kisaran 9%.

Indonesia masih berada di area aman. Kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih ciamik dibandingkan dengan kesembilan negara yang tengah menghadapi krisis tersebut. Produk domestik bruto (PDB) dan struktur ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat. Penerimaan pajak negara juga masih *sustain*. Di lain sisi, utang negara dan swasta masih terkendali. Pun dengan industri manufaktur yang masih baik.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, negeri ini masih jauh dari kondisi yang sedang dialami Sri Lanka saat ini. "Untuk resesi masih jauh. Yang mungkin terjadi peningkatan risiko, berupa melambat atau tertahannya pertumbuhan ekonomi, jika kondisi seperti saat ini terus terjadi," kata Faisal.

Analisis Faisal cukup masuk akal. Ada beberapa indikator pendukung. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia 4,35% (*year on year/yoy*) dan 3,19% per Januari-Juni 2022, sedikit naik di Agustus menjadi 4,9%. Itu masih sangat moderat. Angka itu jauh dibandingkan dengan inflasi di Sri Lanka yang sudah menembus 50% dan berpotensi menuju 80%

Kedua, neraca perdagangan Indonesia masih surplus karena ditopang oleh dua komoditas yang saat ini harganya sedang melambung: batu bara dan kelapa sawit. Indonesia adalah salah satu eksportir utama dua komoditas tersebut. Berbeda dengan Sri Lanka yang merupakan importir minyak bumi.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01%, dan naik lagi per Agustus (kuartal II-2022) menjadi 5,44%.

Tiga indikator tersebut memberikan keyakinan bahwa Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka, yang saat ini pailit. "Asalkan kebijakan yang merespons kondisi global itu bisa dieksekusi secara cepat. Kebijakan moneter dan fiskal harus saling sinergi sehingga dampak buruk dari ekonomi global bisa diredam di dalam negeri," kata Faisal.

Soal eksekusi cepat, Pemerintah Indonesia juga sudah siap payung pengamanan dan *recovery*. Sejak awal 2021, pemerintah telah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini fokus mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Tak hanya soal krisis kesehatan. Program PEN ini juga merespons penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian nasional.

Intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana PEN yang selama tiga tahun (2020-2022) mencapai Rp1.895 triliun itu benar-benar menjadi "doping" dan "pelumas" bagi perekonomian Indonesia. Ada enam klaster yang masuk program PEN, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif utama.

Dari klaster-klaster penerima dana PEN tersebut, klaster UMKM mendapat alokasi dana cukup besar. Hal ini mempertimbangkan sektor UMKM yang punya imbas besar



KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL HARUS SALING SINERGI, SEHINGGA DAMPAK BURUK DARI EKONOMI GLOBAL BISA DIRELAM DI DALAM NEGERI

Mohammad Faisal,
Direktur Eksekutif
CORE Indonesia.

dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional dan berefek domino ke berbagai bidang. Program klaster UMKM ini berupa subsidi bunga, penempatan dana, kredit UMKM, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), PPH final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP), pembiayaan investasi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

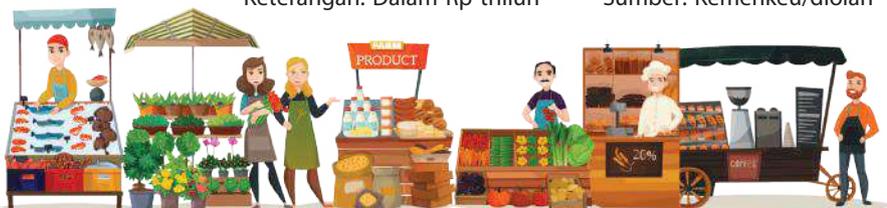
Pada 2020, anggaran program PEN sebesar Rp695,22 triliun, dengan realisasi sebesar Rp575,85 triliun (82,83% dari pagu PEN). Alokasi untuk UMKM sebesar Rp116,31 triliun (16,17% dari pagu PEN) dengan realisasi sebesar Rp112,44 triliun (96,67%). Pada 2021, klaster dukungan untuk UMKM digabung dengan klaster korporasi, dengan anggaran sebesar Rp744,77 triliun, dengan realisasi sebesar Rp658,6 triliun (88,43% dari pagu).

Untuk 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp455,6 triliun. Jumlah tersebut turun 38,8% dari alokasi 2021 atau turun 30,8% dari realisasi sementara anggaran PEN 2021. Pemerintah juga mengurangi jumlah program dalam PEN menjadi tiga klaster, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi. Dari ketiga program itu, penguatan ekonomi menjadi pos dengan anggaran

Program PEN untuk UMKM

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
2021	116,31	112,44	96,67%
2021	162,4	116,2	71,5%
2022	178,3	-	-

Keterangan: Dalam Rp triliun Sumber: Kemenkeu/diolah



terbesar, yakni Rp178,3 triliun, yang sebagian peruntukannya ialah mendukung UMKM. Disusul penanganan kesehatan sebesar Rp122,5 triliun dan perlindungan sosial sebesar Rp154,8 triliun.

Di 2022, pemerintah mengharapkan UMKM dapat mempercepat pemulihan dan penyerapan tenaga kerja, mitigasi dampak *scarring effect* dari pandemi, dan menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif. Dukungan terhadap UMKM di masa pemulihan ini diharapkan tak hanya dari pemerintah melalui program PEN. Industri perbankan nasional juga diminta untuk turut serta mendukung upaya mempercepat pemulihan UMKM. Hal itu disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada acara pembukaan Rapat Umum Anggota (RUA) Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Kamis, 23 Juni 2022, lalu.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suhasil Nazara, menyampaikan tiga pesan kepada Perbanas. Pertama, Wamenkeu meminta perbankan mendorong kredit untuk mendukung UMKM dalam jangka menengah panjang. Menurut data Kemenkeu, per Februari 2022, porsi kredit

UMKM terhadap total kredit perbankan sebesar 21,43%. Angka ini dirasa masih relatif rendah dibandingkan dengan target kredit perbankan yang sebesar 30% untuk UMKM pada 2024 mendatang.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, 30% untuk kredit UMKM. Moga-moga ini kita lakukan dengan memperbanyak UMKM-nya, bukan hanya dengan mengubah definisi. Tolong teman-teman perbankan bisa ikut menjaga itu dalam jangka menengah panjang,” pinta Wamenkeu.

Kedua, Wamenkeu menekankan fungsi intermediasi perbankan untuk mendukung produk dalam negeri. Pemerintah melalui APBN mulai membangun sistem untuk memantau dan mengidentifikasi belanja barang di setiap kementerian/lembaga yang menggunakan produk dalam negeri atau impor. Ke depannya, produk impor akan terus dikurangi dan memperbanyak produk dalam negeri.

“Fungsi intermediasi perbankan memang netral, tapi sudah saatnya kita memperhatikan produksi dalam negeri lebih kuat. Saya ingin titip teman-teman di perbankan, dalam pemberian kredit, dalam berusaha, dalam membangun kebutuhan, gunakan produk dalam negeri,” pesan Wamenkeu.

Ketiga, Wamenkeu mengingatkan pelaku perbankan untuk memperhatikan transisi ekonomi menuju ekonomi hijau atau *green economy*. Sektor keuangan, khususnya perbankan, perlu mendorong kredit yang mendukung keberlanjutan keuangan atau *sustainability finance* untuk sektor dan jasa yang mendukung terwujudnya energi hijau. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan *net zero emission*.

“Perbankan menjadi *intermediaries* yang akan langsung terekspose dengan standar-standar *green*. Dalam jangka panjang, kita punya agenda *green*. Tapi, dalam jangka pendek, agenda kita adalah pemulihan. Jadi, kita juga jangan sampai salah *positioning* di dalam *decision-making process* kita,” tegas Wamenkeu.

Ke depannya, lanjut Wamenkeu, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

“Mohon bantuan dari teman-teman di



“DARI BERBAGAI KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI EKONOMI DAN INSTITUSI PERBANKAN, SAYA BERHARAP DISKUSI YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH, DENGAN KONTRIBUSI PERTUMBUHAN KEUANGAN YANG SEHAT,”

Kartika Wirjoatmodjo,
Ketua Umum Perbanas.

Perbanas supaya ini bisa kita lakukan dengan baik. Mendorong *recovery*, menjaga stabilitas kita, dan kita bisa melanjutkan lagi kehidupan kita. Normalisasi kita lanjutkan pada kebijakan maupun pada kegiatan ekonomi dan bisnis keuangan dan khususnya perbankan,” ujar Wamenkeu.

Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, menyambut baik pesan pemerintah kepada Perbanas, baik terkait dengan kredit jangka menengah panjang, penggunaan produk dalam negeri, maupun transisi menuju ekonomi hijau. “Dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kondisi ekonomi dan institusi perbankan, saya berharap diskusi yang baik dengan pemerintah, dengan kontribusi pertumbuhan keuangan yang sehat,” harap Kartika.

Terkait dengan dukungan industri perbankan melalui *green banking* dalam berkontribusi aktif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut dia, perlu ditindaklanjuti. “Antara lain dengan penyiapan perangkat hukum, penyediaan informasi, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi, serta penelitian bersama,” katanya. ■

“SESUAI ARAHAN BAPAK PRESIDEN, 30% UNTUK KREDIT UMKM. MOGA-MOGA INI KITA LAKUKAN DENGAN MEMPERBANYAK UMKM-NYA. TOLONG TEMAN-TEMAN PERBANKAN BISA IKUT MENJAGA ITU DALAM JANGKA MENENGAH PANJANG,”

Suhasil Nazara,
Wamenkeu RI.

Strategi Turn Around Setelah Dihantam Pandemi

Bank-bank bermodal kuat lebih cepat *turnaround* kinerjanya. Efek pandemi masih terasa di bank-bank kecil, kendati ekonomi nasional mulai membaik. Berlomba meningkatkan dana murah dan membangun ekosistem digital.

Hingga akhir 2021, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut, meski dibayangi kondisi ekonomi global yang dihantui naiknya tensi geopolitik dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS). Perkembangan kasus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali dan kenaikan harga komoditas turut memberikan sentimen positif bagi kondisi ekonomi.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional juga tecermin dari kinerja perbankan yang tumbuh positif setelah kinerjanya babak belur pada 2020. Sejumlah bank yang kinerjanya merosot akibat pandemi berhasil membuat *turnaround*. Bahkan, meraih pertumbuhan *double digit* pada 2021.

Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birl), kredit bank umum pada 2021 tumbuh 3,75% menjadi Rp6.228,65 triliun, jauh lebih baik ketimbang 2020 yang berkontraksi 2,41%. Namun, masih ada 37 bank yang kreditnya menurun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp7.794,59 triliun atau tumbuh 10,60% dari tahun sebelumnya.

Dari sisi kualitas aset, *non performing loan (NPL)* secara industri turun dari 3,06% pada 2020 menjadi 3,00% pada 2021. Namun, ada 14 bank yang harus bekerja lebih keras untuk menjinakkan *NPL*-nya yang tahun lalu sudah melewati batas 5%. Begitu juga dari sisi *loan at risk (LAR)*, ada 31 bank yang masih mencatat *LAR* di atas 20%. Kendati *NPL* melandai di 3,00% dan nilai kredit yang direstrukturisasi terus berkurang, *NPL* kredit restrukturisasi naik dari 8,05% pada 2020 menjadi 10,47% pada 2021.

Kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, turut memengaruhi pendapatan perbankan. Pendapatan bunga bank umum pada 2021 anjlok 1,16% menjadi Rp701,13 triliun. Namun, ditopang beban bunga yang menurun 21,42%, pendapatan bunga bersih secara industri tumbuh positif (11,27%) pada 2021.

Di lain sisi, pendapatan selain bunga bank umum yang pada 2021 mencapai Rp171,82 triliun, 86,25%-nya berasal dari 20 bank yang memiliki aset di atas Rp100 triliun. Lihat saja kontribusi *fee based income* di 19 bank beraset kurang dari Rp10 triliun yang hanya 9,26% dari total pendapatan operasionalnya. Sedangkan, kontribusi *fee based income* di 20 bank terbesar atau beraset di atas Rp100 triliun mencapai 20,38% dari total pendapatan operasionalnya.

Sementara itu, pertumbuhan laba industri meroket 34,46% pada 2021, setelah tahun sebelumnya merosot tajam sebesar 34,18%. Namun, tercatat ada 34 bank yang labanya menurun, di mana 18 bank di antaranya

mencatat kerugian. Bahkan, delapan bank di antaranya mencatat kerugian dalam dua tahun berturut-turut sejak 2020.

Sepanjang 2021 bank-bank bermodal jumbo mampu bangkit dari tekanan akibat pandemi COVID-19 pada 2020. Misalnya, bank-bank yang tergabung dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 atau bermodal inti di atas Rp70 triliun, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA). Keempat bank ini mampu *turnaround* dan mencatatkan kinerja yang gemilang.

Dari sisi laba, keempat bank jumbo tersebut berhasil mencetak total laba bersih Rp99,72 triliun dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih 115,61% secara tahunan. Meningkatnya laba tak lepas dari penyaluran kredit yang juga meningkat 7,20%.

Di satu sisi, tahun 2021 masih menjadi tahun yang berat bagi bank-bank yang memiliki modal minimal. Misalnya, bank yang tergabung dalam KBMI 1 atau bermodal inti di bawah Rp6 triliun. Kendati pada 2021 ekonomi mulai tumbuh pascapandemi, bank-bank di kelompok ini masih berada dalam



BRI FOKUS PADA ASPEK LIKUIDITAS, TERUTAMA PERTUMBUHAN DANA MURAH, DAN MENJAGA KUALITAS KREDIT, TERUTAMA KREDIT YANG DIRESTRUKTURISASI.

Sunarso,
Direktur Utama BRI

ruang yang terbatas untuk segera mengakselerasi bisnisnya.

Jumlah bank di KBMI 1 mencapai 69 bank atau 64,49% dari total 107 bank umum yang beroperasi di Indonesia per 2021. Meski jumlahnya paling banyak, total aset bank di kelompok ini hanya Rp1.165,65 triliun atau sekitar 10,91% dari total aset bank umum per 2021. Rata-rata asetnya hanya Rp16,89 triliun, sangat jauh dari rata-rata aset bank umum yang mencapai Rp99,85 triliun.

Pada 2021 pertumbuhan kredit bank-bank KBMI 1 tercatat 1,85% secara tahunan atau menjadi Rp640,60 triliun, masih di bawah pertumbuhan kredit bank umum yang sebesar 4,92%. Belum derasnya kucuran kredit yang diikuti dengan naiknya beban operasional, membuat banyak bank di kelompok ini tak mampu membukukan laba. Hingga akhir 2021, total laba bersih bank KBMI 1 anjlok 62,51% menjadi Rp2,49 triliun dari Rp6,63 triliun pada 2020. Untuk dapat bertahan, bank-bank ini pun memperkuat permodalan. Hal itu tecermin dari modal disetor yang meningkat 13,57% menjadi Rp112,91 triliun.

Memasuki enam bulan pertama 2022, sejumlah bank melanjutkan tren kinerja positif. Demi menjaga kinerjanya, bank berlomba-lomba meningkatkan dana murah dan membangun ekosistem digital untuk dapat menjangkau lebih banyak nasabah dan lebih efisien.

Menurut Direktur Utama BRI, Sunarso, untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan BRI fokus pada aspek likuiditas, terutama pertumbuhan dana murah, dan menjaga kualitas kredit, terutama kredit yang direstrukturisasi akibat pandemi COVID19. "Peningkatan CASA yang dilakukan oleh perseroan selaras dengan transformasi yang sedang dijalankan BRI, di mana inisiatif strategis yang dijalankan difokuskan untuk mengakselerasi *CASA growth*," ujar



Sunarso dalam *press conference* Pemaparan Kinerja Keuangan Kuartal II Tahun 2022, pada Rabu, 27 Juli 2022.

Tak hanya BRI, bank Himbara lainnya, seperti Bank Mandiri, juga akan menekan biaya dana atau *cost of fund* di level yang rendah untuk menjaga profitabilitasnya.

Dalam hal ini, Bank Mandiri akan mengoptimalkan peran ekosistem digital untuk mendorong dana murah.

Menurut Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo, Bank Mandiri menyadari bahwa pendapatan yang bersumber

dari bunga kredit akan terus mengalami tekanan di tengah persaingan dan *bench market* yang saat ini berada di level yang cukup rendah. "Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan *fee based income* dan juga dana murah atau *CASA ratio*," kata Sigit Prastowo.

Adapun, bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat, yaitu Bank BJB, konsisten mencatatkan kinerja terbaik sampai dengan pertengahan tahun ini. Ke depan Bank BJB juga akan terus mengembangkan ekosistem digital.

"Ekosistem keuangan Bank BJB dalam konsep *branchless bank* akan terus dioptimalkan utilitasnya dan dikejar pertumbuhannya hingga menjadi bagian dari kontributor *fee based income* yang jauh lebih besar di masa yang akan datang," kata Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB.

Tahun ini inflasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara lain, tapi sudah melebihi target tahunan Bank Indonesia (BI) yang sebesar 3% plus minus 1%. Jika laju inflasi terus merangkak, kredit perbankan Indonesia yang pertumbuhannya telah menembus dua digit terancam kembali melambat. ■

BANK MANDIRI AKAN MENOPTIMALKAN PERAN EKOSISTEM DIGITAL UNTUK MENDORONG DANA MURAH.

Sigit Prastowo,
Direktur
Keuangan dan
Strategi Bank
Mandiri



EKOSISTEM KEUANGAN BANK BJB DALAM KONSEP BRANCHLESS BANK AKAN TERUS DIOPTIMALKAN UTILITASNYA DAN DIKEJAR PERTUMBUHANNYA.

Yuddy Renaldi,
Direktur Utama
Bank BJB

Alarm Pembiayaan Bank dari Sektor Properti

Sektor properti mulai menggeliat. Guyuran insentif dari pemerintah diharapkan mampu mendorong sektor ini kembali bergairah. Alarm untuk pembiayaan bank.

Upaya masif yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 membuahkan hasil. Selain terbilang sukses dalam menekan angka penyebaran virus di masyarakat, perekonomian nasional perlahan mulai bangkit ke jalur positif. Hal itu tecermin dari capaian produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tumbuh 5,01% secara tahunan atau *year on year* (yoy) pada kuartal pertama 2022.

Tumbuhnya perekonomian dalam negeri tentunya ditopang oleh sektor industri yang mulai menggeliat, salah satunya sektor properti. Sektor ini dapat dikatakan cukup tahan banting terhadap berbagai faktor, termasuk disrupsi digital.

Data Bank Indonesia (BI) tentang perkembangan properti komersial (PPKOM) menunjukkan, pada kuartal pertama 2022, permintaan properti komersial tercatat tumbuh positif 1,19% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan keempat 2021 yang tercatat tumbuh 1,01% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh perbaikan permintaan pada kategori jual yang mengalami peningkatan 1,16% (yoy) pada kategori jual, khususnya di segmen perkantoran jual, lahan industri, dan *warehouse complex* di beberapa wilayah terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sejalan dengan adanya pemulihan atau

recovery serta ekspansi bisnis oleh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan *data center* dari dalam negeri, Korea, dan Tiongkok.

Di lain sisi, pada kategori sewa, permintaan properti komersial di triwulan pertama 2022 tetap tumbuh 7,54% (yoy). Namun, memang mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu di triwulan keempat 2021 yang tumbuh 10,41% (yoy). Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh permintaan pada segmen *convention hall* yang tidak setinggi periode sebelumnya dan khususnya segmen hotel yang cenderung melambat di awal tahun, seiring dengan pola historis dunia usaha dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, serta dampak kasus COVID-19 varian Omicron pada Februari-Maret 2022.

Dari sisi pasokan, indeks pasokan properti komersial mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan di triwulan pertama tahun ini yang tercatat 1,24% (yoy). Pertumbuhan ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021. Berdasarkan segmen, pasokan untuk kategori jual mengalami peningkatan sebesar 1,24% yang disebabkan oleh penambahan pasokan pada segmen lahan industri dan *warehouse complex* di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Sedangkan, segmen lainnya antara lain ritel jual dan perkantoran cenderung tetap atau

tidak ada penambahan pasokan. Sementara, untuk kategori sewa tercatat melambat 0,74% (yoy), dikarenakan segmen hotel yang belum pulih sepenuhnya dan beroperasi penuh karena pandemi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan, sektor properti berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Di samping itu, sektor properti memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya. "Harus diakui, sektor properti juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB)," ujar Piter.

Setidaknya, imbuhnya, ada lima faktor yang membuat sektor properti turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Pertama, properti merupakan sektor yang padat modal, mulai dari sisi pembangunan hingga pembiayaan. Kedua, sektor yang padat karya, karena setidaknya dibutuhkan lima orang pekerja untuk membangun satu unit rumah atau sekitar 500.000 pekerja untuk membangun 100.000 unit rumah. Ketiga, mampu mendukung industri produk lokal, karena 90% bahan bangunan yang dipakai untuk keperluan konstruksi merupakan produk lokal.

Keempat, mendukung penerimaan negara, karena setiap rumah yang terjual akan mengasihkan penerimaan negara dalam bentuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan, bea balik nama (BBN), pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kelima, sektor properti banyak menghasilkan *entrepreneur* atau wirausaha di bidangnya.

Ke depannya, sektor properti diproyeksi akan makin cerah seiring dengan makin membaiknya kondisi perekonomian

"HARUS DIAKUI, SEKTOR PROPERTI JUGA MEMILIKI KONTRIBUSI YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENINGKATAN NILAI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB),"

Piter Abdullah,
Ekonom CORE
Indonesia.



nasional. Di sisi yang bersamaan, pemerintah juga terus memberikan stimulus bagi masyarakat dengan memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

"Pada 2022, kita lihat insentif akan diberikan selama sembilan bulan sampai September nanti, yaitu insentif PPN DTP 50%, diskon penjualan rumah yang paling tinggi Rp2 miliar, dan diskon 25% dengan harga jual rumah sekitar Rp2 miliar hingga Rp5 miliar," ungkap Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan RI.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan terkait insentif PPN DTP rumah. Insentif ini berlaku sejak awal tahun hingga September 2022. Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang ditanggung pemerintah. Perpanjangan insentif PPN DTP ini selaras dengan keberlanjutan program PEN.

"Ini artinya tambahan dari yang sudah ada. Kami harap penjualan dan pembangunan rumah meningkat di 2022. Kalau meningkat, *multiplier effect*-nya tercipta di perekonomian nasional. Kami harap bukan saja pembangunan rumah meningkat tapi berimbas pada pembiayaan perbankan yang meningkat," harap Suahasil.

Dalam mendukung kinerja sektor properti yang pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian, berbagai insentif kebijakan juga diberikan oleh BI, OJK, dan LPS. "Ketika kita lihat sektor properti, kita diskusi bagaimana kontribusi Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS sebagai lembaga terus mendorong dan memberi keyakinan kepada sektor keuangan untuk salurkan kredit pembiayaan, likuiditas perbankan, dan mendorong *demand* termasuk properti dan konstruksi," paparnya.

Meski memiliki prospek cerah, ada sejumlah tantangan untuk sektor properti, antara lain inflasi serta kenaikan suku bunga. Jika inflasi meningkat, kemungkinan besar suku bunga juga akan menyesuaikan, sehingga akan menambah tekanan pada industri properti. Ini yang harus diantisipasi bersama. ■

"KALAU PROPERTI MENINGKAT, MULTIPLIER EFFECT-NYA TERCIPTA DI PEREKONOMIAN NASIONAL. KAMI HARAP INI BERIMBAS PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN YANG MENINGKAT,"

Suahasil Nazara,
Wakil Menteri
Keuangan RI.



Taksonomi Hijau ASEAN

Potensi & Dampak ke Perbankan

Negara-negara di kawasan ASEAN rentan terhadap perubahan iklim, meski di lain sisi menawarkan potensi besar bagi pembiayaan berkelanjutan. Taksonomi hijau diharapkan mampu mendatangkan investasi global yang lebih besar dan ramah lingkungan di kawasan ini.

Perubahan iklim menjadi salah satu isu utama yang banyak didiskusikan, termasuk di kalangan pelaku industri jasa keuangan. Sektor keuangan dinilai bisa memainkan peranan penting dalam mendorong percepatan transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*). Ini tidak lepas dari peran sektor jasa keuangan dalam memfasilitasi permodalan atau pembiayaan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Karena itu, perlu dilakukan pemetaan (*mapping*), pembiayaan ke sektor-sektor mana saja yang dapat memberikan dampak positif ataupun negatif pada lingkungan.

Para investor pun saat ini makin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Mereka menaruh perhatian dan cenderung lebih ingin menggelontorkan investasi ke sektor yang dinilai "hijau" alias ramah lingkungan. Sejalan dengan itu, sektor jasa keuangan juga terus berupaya memperbesar porsi pembiayaan atau kreditnya ke sektor-sektor hijau. Tren pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing*) akan makin berkembang ke depan.

Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang sudah memiliki dokumen taksonomi hijau (*green taxonomy*). Awal 2022 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Taksonomi Hijau Indonesia, sebuah panduan terkait dengan aktivitas hijau. Taksonomi hijau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi dan sektor-sektor mana saja yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Taksonomi hijau digagas untuk mendorong inovasi penciptaan produk, proyek, maupun inisiatif hijau sesuai dengan standar ambang batas oleh pemerintah.

Taksonomi hijau menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi target Paris Agreement. Indonesia pun mencanangkan *net zero emission* pada 2060. Taksonomi hijau selaras dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, seperti yang ditegaskan dalam UN Climate Change Conference ke-26 (COP26). Bila diperinci lebih dalam, pedoman dalam Taksonomi Hijau Indonesia tak jauh berbeda dengan pedoman serupa yang sudah disusun beberapa negara, seperti China Green Catalogue dan UE Green Taxonomy.

Di ASEAN, Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki dokumen hijau, setelah Malaysia. Sebelumnya, negara-negara ASEAN sendiri sudah mencapai kesepakatan untuk memenuhi Paris Agreement. Kawasan ASEAN



Presiden Jokowi; saat peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia.

menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara-negara di kawasan ini menyadari bahwa ada potensi penurunan produk domestik bruto (PDB) per kapita akibat ancaman perubahan iklim. Karena itu, negara-negara ASEAN membangun komitmen regional untuk mendukung pengembangan agenda *sustainable*, antara lain dengan membentuk ASEAN Taxonomy Board (ATB) pada Maret 2021.

Pada KTT COP26 yang berlangsung pada November 2021, ATB meluncurkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (Taksonomi ASEAN) versi pertama yang sekaligus dikemas dalam *webinar* bertema "ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance: Facilitating Transition Towards a Sustainable ASEAN". Taksonomi ASEAN menjadi inisiatif bersama yang disusun dengan menyatukan pandangan dari regulator pasar modal, asuransi, dan perbankan negara-negara anggota ASEAN.

Taksonomi ASEAN digagas sebagai suatu sistem yang inklusif dan kredibel dalam mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Dalam penyusunannya, standar taksonomi yang sudah ada tentu mempertimbangkan taksonomi yang sudah ada untuk *benchmarking*. Namun, dikombinasikan juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara anggota ASEAN yang berbeda-beda.

Pembentukan taksonomi ASEAN diharapkan mampu menarik investasi global ke ASEAN untuk menopang pembangunan berkelanjutan. Apalagi, preferensi investor untuk menginvestasikan dananya di sektor *green economy* sekarang ini makin besar. Para investor lebih memprioritaskan investasi di sektor-sektor ekonomi hijau. Negara-negara ASEAN sendiri memiliki kebutuhan akan pembiayaan berkelanjutan yang sangat besar.

Contohnya, Indonesia, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga nol pada 2060. Transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Di samping itu, Indonesia memang mempunyai potensi besar untuk sektor hijau. Namun, selama ini memang belum digarap secara optimal.

Lalu, bagaimana pelaku sektor jasa keuangan berkontribusi mewujudkan aspirasi penerapan ekonomi hijau? Sejauh ini sejumlah bank di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Tren pembiayaan berkelanjutan terus berkembang. Sektor jasa keuangan menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan penetrasi pembiayaan ke sektor ramah lingkungan. Kebutuhan pembiayaan atau investasi ke sektor energi bersih sangatlah besar. Ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi sektor jasa keuangan.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memprediksi kebutuhan dunia akan dana investasi untuk energi bersih, misalnya, mencapai US\$2,4 triliun per tahun hingga 2035. Lalu, ada kebutuhan sekitar US\$1,6 triliun sampai dengan US\$3,8 triliun per tahun untuk investasi sistem pasokan energi hingga 2050.

Ambil contoh, Indonesia. Pemerintah bertekad melakukan *phasing out* (penghentian secara bertahap) PLTU batu bara. Pemerintah mengkaji potensi memensiunkan PLTU batu bara lebih cepat dengan kapasitas 9,3 GW sebelum 2030. Langkah itu bisa dilakukan dengan dukungan pembiayaan yang mencapai US\$48 miliar. Kebutuhan itu baru berasal dari *phasing out* PLTU batu bara saja.

Dari sektor perbankan, ada beberapa bank yang sudah menyatakan komitmen untuk mencapai *net zero emission financing*. Di antaranya, DBS Group yang memberikan komitmen pembiayaan SGD50 miliar untuk *green financing* hingga 2024. Sampai dengan saat ini, realisasinya sudah lebih dari SGD35 miliar. Bank asal Singapura ini bertekad mencapai *net zero emission financing* pada 2050. DBS Group, termasuk DBS Indonesia, terus memacu pembiayaan ke sektor-sektor ramah lingkungan. Pada saat yang

KOMPONEN UTAMA TAKSONOMI ASEAN VERSI 1:

- (A) FOUNDATION FRAMEWORK YANG TERDIRI ATAS EMPAT TUJUAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL OBJECTIVES) DAN DUA KRITERIA PENTING (ESSENTIAL CRITERIA) YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MENILAI SUATU KEGIATAN EKONOMI;
- (B) DAFTAR SEKTOR UTAMA YANG AKAN MENERAPKAN PLUS STANDARDS, YANG TERDIRI ATAS ENAM SEKTOR UTAMA DALAM HAL EMISI GAS RUMAH KACA DAN TIGA SEKTOR PENDUKUNG YANG BERKONTRIBUSI UNTUK MENCAPAI TUJUAN LINGKUNGAN;
- (C) DECISION TREE SEBAGAI PANDUAN BAGI PENGGUNA TAKSONOMI ASEAN UNTUK MENGLASIFIKASIKAN KEGIATAN EKONOMINYA; DAN
- (D) METODOLOGI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN THRESHOLDS BERDASARKAN PLUS STANDARDS, YANG AKAN DIKEMBANGKAN PADA TAKSONOMI ASEAN FASE BERIKUTNYA.

3 KLASIFIKASI KRITERIA PADA TAKSONOMI HIJAU INDONESIA

- HIJAU: TIDAK MERUGIKAN SECARA SIGNIFIKAN, MENERAPKAN PENGAMANAN MINIMUM, MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF TERHADAP LINGKUNGAN, DAN SELARAS DENGAN TUJUAN LINGKUNGAN DARI TAKSONOMI.
- KUNING: TIDAK MEMBAHAYAKAN SECARA SIGNIFIKAN.
- MERAH: KEGIATAN BERBAHAYA.

3 TANTANGAN IMPLEMENTASI TAKSONOMI HIJAU VERSI DJK

1. BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH DATA YANG GRANULAR DAN REPRESENTATIF. HAL INI MENGGAT PROSES PENILAIAN OLEH SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM MENGLASIFIKASIKAN HIJAU DAN NONHIJAU DARI EKSTING ATAU DEBITUR YANG DIBAYAI DALAM PORTFOLIONYA.
2. BAGAIMANA MEYAKINI KONSISTENSI DATA YANG LAPORKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TINGKAT PEMAHAMAN BERBEDA ANTARA SEKTOR KEUANGAN DAN JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENDATAAN.
3. MEMASTIKAN PENERAPAN YANG CUKUP RIGID. NAMUN, TENTUNYA KE DEPAN AKAN MENJADI MAKIN DINAMIS SEIRING DENGAN POTENSI KEBIJAKAN KEMENTERIAN DAN LEMBARA.

sama, mulai mengurangi *financing* ke sektor-sektor yang menghasilkan karbon. DBS menawarkan sejumlah skema ataupun instrumen berkaitan dengan pembiayaan berkelanjutan.

Lalu, ada juga Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mendukung penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan menyalurkan kredit ke sektor usaha berkelanjutan. Sampai dengan kuartal kedua 2022, BRI menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha berkelanjutan hingga Rp639 triliun atau setara dengan 65% dari total kredit perseroan. Selain itu, BRI membiayai proyek berwawasan lingkungan dengan total nilai Rp71,5 triliun. Belum lama ini BRI juga mengeluarkan *green bond* senilai Rp5 triliun.

Selanjutnya, ada Bank Mandiri yang pada kuartal pertama 2022 menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp209,8 triliun atau setara dengan 24,9% dari total kredit perseroan. Sedangkan, pembiayaan hijau mencapai Rp96,8 triliun atau 11,5% terhadap total kredit Bank Mandiri. Dalam rangkaian kegiatan *event Finance Ministers and Governors Central Bank (FMGCB) G20* di Bali, Juli lalu, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, memaparkan, untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, kebutuhan pembiayaan hijau mencapai US\$281 miliar.

"Bank Mandiri secara konsisten terus melanjutkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) yang dapat berkontribusi secara langsung terhadap industri keuangan nasional. Antara lain, dengan mengembangkan pembiayaan yang selaras dengan POJK 51/2017, Roadmap NDC/NZE Indonesia, serta *framework ESG* (Environmental, Social, and Governance) yang mengacu pada *best practices*," terangnya, pada 20 Juli 2022.

Sektor jasa keuangan memang diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam menghadapi perubahan iklim. Apalagi mengingat kebutuhan investasi yang sangat besar untuk menuju energi bersih. Sektor jasa keuangan berperan penting sebagai penopang ekonomi dan sektor riil, termasuk lewat perannya sebagai penyedia sumber daya keuangan.

Sektor jasa keuangan bisa berkontribusi bagi negara dalam mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Caranya, dengan mengalokasikan pembiayaan ke sektor-sektor yang ramah lingkungan. Memang harus diakui, meski tak sedikit bank yang telah memperlihatkan kemampuan mereka dalam mendanai sektor atau proyek hijau, pangsa portofolio hijau mereka masih rendah bila dibandingkan dengan total pembiayaan perbankan. ■

Pasca-Laporan BPK BI Terus Benahi BI Fast

Dorongan BI dalam akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui BI Fast semakin kencang. Masih terus dibenahi agar semakin optimal dalam memberikan layanan kepada nasabah bank.

BI Fast, infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional besutan Bank Indonesia (BI) terus berkembang sejak diimplementasikan secara bertahap pada Desember 2011. Dari sisi kepesertaan, bank yang masuk sebagai peserta juga terus bertambah. Per Agustus 2022 lalu, jumlah bank peserta BI Fast telah mencapai 77 peserta, dengan masuknya peserta baru sebanyak 25 bank.

Total 77 peserta tersebut sudah termasuk peserta BI-Fast gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Jumlah tersebut sudah mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. BI optimistis, komitmennya dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui perluasan peserta *fast payment* BI ini akan semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara murah, cepat, aman, dan andal.

Meski berkembang pesat, namun bukannya tidak ada permasalahan yang menghadang. Baur-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan terdapat permasalahan pada biaya transfer BI Fast. Sistem pembayaran ritel nontunai ini dinilai tidak transparan dan akuntabel. Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPK RI.

Menurut laporan BPK, BI telah menetapkan biaya transaksi kredit individual BI FAST melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/KEP.DpG/2021 tentang Penetapan Biaya Transaksi dalam Penyelenggaraan BI Fast. Namun, BI dinilai belum memiliki pedoman baku untuk menghitung biaya transfer dana dan belum memiliki peraturan mengenai tata cara pengenaan biaya transfer dana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Saat ini, biaya transfer antarbank menggunakan BI Fast sebesar Rp 2.500 per transaksi ke seluruh bank yang terdaftar dalam sistem BI Fast. Besaran biaya transfer tersebut lebih murah dibandingkan biaya transfer antarbank pada umumnya, yakni Rp 6.500 per transaksi. Dengan adanya temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur BI Perry Warjiyo untuk memerintahkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) berkoordinasi dengan Kepala Departemen Hukum (DHK) untuk menyusun kebijakan harga sistem pembayaran termasuk transfer dana, sesuai



dengan amanat Pasal 68 UU Nomor 3 Tahun 2011.

Menanggapi temuan BPK tersebut, BI berkomitmen menindaklanjutinya. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pihaknya sudah membahas temuan BPK ini secara internal dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

"Pasti kami tindaklanjuti. Karena kan semuanya berniat baik. BPK tentu saja harus menjaga *governance*, kami akan memperbaiki *governance*-nya," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Erwin, biaya transfer BI Fast sebesar Rp 2.500 antarbank per transaksi termasuk lebih murah dari biaya transfer pada umumnya yang sebesar Rp 6.500 per transaksi. Biaya transfer yang lebih murah memiliki tujuan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Ia menjelaskan, dalam menentukan besaran biaya transfer BI Fast, BI tidak hanya mempertimbangkan elemen pengembalian investasi tetapi juga mempertimbangkan elemen kebijakan menyediakan sistem pembayaran yang murah untuk masyarakat guna mempercepat digitalisasi.

Meski demikian, BI menghormati hasil pemeriksaan BPK tersebut karena bertujuan agar *governance* BI Fast bisa menjadi lebih baik ke depannya. Erwin memastikan hasil temuan BPK terhadap BI Fast tak lantas mengancam keberlangsungan pelaksanaan BI Fast saat ini. ■

OJK Rilis Aturan Baru Biro Kredit Partikelir

Ada lima pokok penyempurnaan dalam POJK terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan terbaru. Diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit secara signifikan dan komprehensif.



EJAK pertengahan 2022 lalu, ada perkembangan terbaru terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5/POJK.03/2022.

Peraturan OJK ini dikeluarkan dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui pengembangan informasi perkreditan. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan secara signifikan dan komprehensif atas pengaturan *existing*, yaitu POJK Nomor 42/POJK.03/2019.

Ada lima pokok penyempurnaan dalam POJK LPIP terbaru ini. Satu, penegasan LPIP sebagai lembaga pemeringkatan di sektor jasa keuangan. Dua, peningkatan modal disetor minimum dan pengaturan modal bersih dalam rangka menjamin keberlangsungan bisnis LPIP dalam rentang lima tahun ke depan. Tiga, pengembangan produk dan jasa LPIP. Empat, pembatasan akses data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk LPIP. Dan, lima, implementasi tata kelola di LPIP.

LPIP sendiri merupakan lembaga pemeringkat swasta (partikelir). Tugasnya menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan. Lembaga ini juga bisa memberikan jasa pemeringkatan terhadap debitur atau nasabah berdasarkan data kredit atau pembiayaan.

Ada beberapa hal yang dihasilkan oleh LPIP terkait informasi perkreditan. Antara lain karakter dan rekam jejak debitur atau nasabah, kemampuan debitur atau nasabah untuk memenuhi kewajiban, informasi statistik untuk perencanaan, pengembangan usaha, dan penentuan kebijakan, informasi untuk pengukuran kinerja, dan pemantauan profil risiko debitur atau nasabah.

Pada aturan terbaru ini, modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit Rp200 miliar. LPIP juga wajib menjaga nilai modal bersih sebesar 50% dari modal disetor minimum. Sumber dana modal disetor untuk mendirikan LPIP tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain. Selanjutnya, sumber dana untuk peningkatan setoran modal LPIP dapat berupa uang tunai atau aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung LPIP.

Dalam aturan terbaru tersebut, LPIP juga diperbolehkan untuk memanfaatkan tenaga kerja asing. Namun, disesuaikan



dengan posisi jabatan tersebut. Ada beberapa jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing, seperti anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, tenaga ahli, atau konsultan.

Meski membolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing, LPIP harus tetap mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga ahli atau konsultan lokal untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan. Jika menggunakan tenaga kerja asing, LPIP juga harus menyediakan dua orang tenaga pendamping lokal untuk masing-masing tenaga kerja asing tersebut.

Perekrutan tenaga kerja asing, meski dipilih oleh LPIP, namun keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas. "Pemanfaatan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan," tulis aturan tersebut.

Pengaturan tentang LPIP sendiri telah ada sejak pengaturan dan pengawasan industri perbankan masih di bawah Bank Indonesia (BI). Yakni dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Bi No. 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal LPIP.

Sejauh ini, belum banyak LPIP yang sudah memiliki izin dan menjalankan operasionlanya sebagai lembaga pemeringkat perkreditan. Setidaknya, ada dua LPIP yang sudah beroperasi sejak dikeluarkannya SE BI No 15 tersebut, yakni Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) dan Pefindo Biro Kredit (PBK).

KBIJ adalah biro kredit swasta pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 atau setahun sejak keluarnya SE BI terkait LPIP. Sejauh ini ada beberapa perusahaan keuangan/perbankan yang telah menjalin kerjasama dengan KBIJ, antara lain Bank Mega, Home Credit Indonesia, Layanan Keuangan Berbagi (DanaRupiah), Atome Finance Indonesia (Atome), Trust Teknologi Finansial (TrustIQ), M.B.A. Consulting Indonesia, dan Aksata Pratama Teknologi.

Sementara, Pefindo Biro Kredit memperoleh izin operasional dari OJK pada 22 Desember 2015 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 27 Maret 2017. Pendiri Pefindo Biro Kredit adalah Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan pemegang saham antara lain Pefindo, Bursa Efek Indonesia, Pegadaian, Cahaya Teknologi Optima Sejahtera (CTOS), Dana Pensiun Bank Indonesia, Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), Taspem, Consumer Information Consulting, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). ■

Bintang Vietnam di Ekonomi Digital Asia Tenggara

Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan paling kencang di dunia. Negara ini memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik dengan Indonesia. Vietnam sedang menjadi “bintang” yang mengangkas di langit Asia Tenggara.

Asia Tenggara merupakan wilayah yang strategis karena terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta Asia Timur dengan Asia Tengah. Negara-negara yang berada di kawasan ini tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dengan posisi strategis tersebut, negara-negara anggota ASEAN berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan internasional sehingga berdampak positif pada perekonomian mereka.

Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu mitra dagang penting bagi negara-negara anggota ASEAN. Secara kumulatif, sepanjang 2021 nilai perdagangan ASEAN dan AS mencapai US\$364,45 miliar. Perinciannya, ekspor ASEAN ke AS mencapai US\$255,12 miliar, sedangkan impor ASEAN dari AS tercatat US\$109,34 miliar. Jika dilihat data per negara, perdagangan ASEAN-AS pada tahun lalu dipimpin Vietnam dengan total nilai US\$111,44 miliar. Porsinya mencapai 30,58% dari total perdagangan ASEAN-AS.

Tak hanya dengan AS, Vietnam juga memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik dengan Indonesia. Buktinya, total perdagangan Indonesia-Vietnam menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Vietnam tumbuh 37,07% menjadi US\$11,06 miliar (sekitar Rp172,2 triliun) pada 2021. Angka ini berhasil melampaui target yang sebelumnya ditetapkan kedua negara senilai US\$10 miliar. Dari total perdagangan itu, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai US\$6,85 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Vietnam tercatat US\$4,21 miliar. Alhasil, neraca perdagangan Indonesia surplus US\$2,64 miliar.

Indonesia dan Vietnam sepakat menargetkan perdagangan senilai US\$15 miliar pada 2028. Rencana tersebut dibahas ketika Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, bertemu dengan Y.M. Bui Thanh Son, Menteri Luar Negeri Vietnam, di Jakarta, pada Rabu, 20

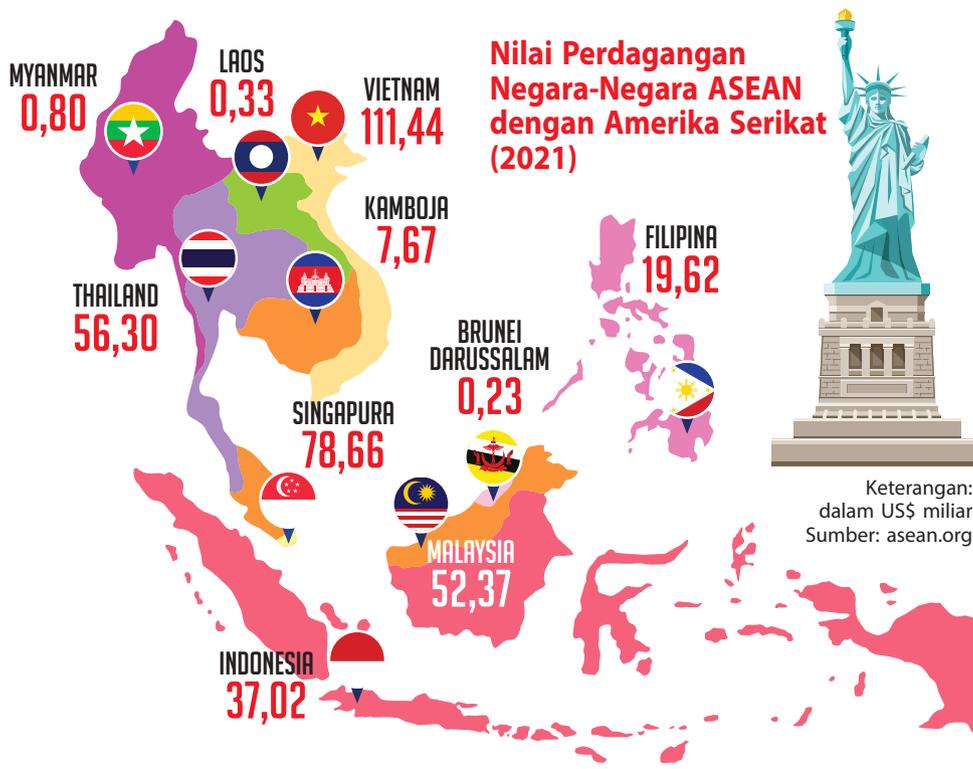


Vietnam; ekonomi tumbuh paling kencang di dunia.

Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk melanjutkan kemitraan Indonesia-Vietnam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) dengan mempercepat finalisasi Plant of Action periode 2024-2028 sebagai pedoman dalam kerja sama bilateral ke depan.

“Guna mencapai target tersebut, kami membahas upaya penyederhanaan aturan akses pasar untuk berbagai produk, termasuk sektor farmasi dan pertanian, untuk menggali potensi berbagai komoditas dan produk yang belum dimanfaatkan serta untuk meningkatkan hubungan *business to business*,” ujar Retno Marsudi, bulan lalu.

Sementara itu, Y.M. Bui Thanh Son mengungkapkan bahwa hubungan Indonesia dan Vietnam harus terus dikembangkan, meski di tengah banyak tantangan, salah satunya pandemi



7% per tahun. Sedangkan, pada 2020 Vietnam menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu mencatat pertumbuhan PDB, yaitu 2,9%. PDB per kapita Vietnam tumbuh menjadi US\$2.800 dari US\$422 pada 1986.

Dari angka PDB tersebut, terlihat bahwa motor pertumbuhan Vietnam telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang mencakup 75% dari total PDB-nya. Di samping itu, inflasi negara ini terus dijaga di bawah 4% yang menjadi target pemerintah. Ketika faktor-faktor itu digabungkan, hasilnya adalah lonjakan ekspor. Dalam satu dekade terakhir, ekspor perusahaan-perusahaan domestik melonjak 137%, sementara ekspor perusahaan-perusahaan asing melesat hingga 422%.

Saat ini ekonomi digital diharapkan memainkan peranan sentral untuk menjaga momentum pertumbuhan Vietnam. Meski masih dalam tahap awal, ekonomi digital di Vietnam menunjukkan potensi luar biasa karena dukungan pemerintah, meningkatnya pemanfaatan digital dalam populasi, dan pandemi yang mempercepat tren digital. Ekonomi digital akan menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Vietnam dalam beberapa tahun mendatang.

Didukung fondasi makro-ekonomi yang solid, pemerintah yang progresif, serta meningkatnya populasi penduduk berusia muda dan melek teknologi, ekonomi digital menawarkan potensi besar bagi para *start up* untuk berkembang dan menciptakan nilai tambah. Dengan momentum yang impresif saat ini, Vietnam berada di jalurnya untuk menjadi kekuatan ekonomi digital baru di Asia Tenggara. ■

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Karena itu, dalam Rencana Aksi Implementasi Kemitraan Strategis 2019-2023, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mengonsolidasikan dan memperdalam kemitraan antara dua negara dengan memperkuat kepercayaan politik, memajukan mekanisme kerja sama bilateral, serta menjaga momentum pertumbuhan perdagangan dan investasi.

“Kedua negara juga harus memajukan kerja sama di bidang lain, termasuk pertahanan, keamanan, pertanian, energi, dan pariwisata. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia menuju pemulihan pascapandemi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bui Thanh Son.

Indonesia dan Vietnam telah mengadopsi kerangka kerja ASEAN tentang pemulihan ekonomi dampak pandemi. Hal ini berfokus pada sumber daya manusia (SDM), integrasi ekonomi, digitalisasi, dan kemajuan. Terdapat tiga sektor potensial kerja sama antara Indonesia dan Vietnam, antara lain industri perikanan, teknologi tinggi, dan ekonomi digital serta kesehatan masyarakat.

Industri perikanan adalah sektor potensial pertama yang dapat dijajaki dalam kerja sama Indonesia-Vietnam. Kedua negara memiliki wilayah laut yang cukup luas di kawasan ASEAN dan saling berbatasan. Vietnam punya 700.000 kilometer persegi (km²) dan Indonesia memiliki 5,8 km² wilayah laut. Untuk garis pantai, Vietnam memiliki 3.200 kilometer, sedangkan garis pantai Indonesia 95.000 kilometer. Kedua negara pun tertarik untuk mengembangkan industri perikanan.

Dalam hal teknologi tinggi dan ekonomi digital, berpedoman pada digitalisasi yang menjadi salah satu poin dalam kerangka kerja sama yang diadopsi dari ASEAN. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 telah meningkatkan pertumbuhan industri digital dengan cukup pesat. Kedua negara memiliki populasi penduduk berusia muda yang besar. Kelompok berpenghasilan menengah di kedua negara pun berkembang pesat. Sementara, pertumbuhan ekonomi tidak akan ada artinya jika kesehatan masyarakat terancam oleh pandemi. Karena itu, hal ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan negara, dan Vietnam telah menjadi mitra berharga terkait dengan kesehatan masyarakat.

Vietnam menjadi “bintang” yang sedang menanjak di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan paling kencang di dunia. Pada periode 2009-2019 Produk Nasional Bruto (PDB) Vietnam tumbuh rata-rata

RUA Perbanas 2022 Sahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

PERHIMPUNAN Bank Nasional (Perbanas) berhasil menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) Perbanas di Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. RUA Perbanas yang digelar secara *offline* sejak pandemi Covid-19 ini menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perbanas tahun buku 2021. Laporan tersebut berisi tentang pengurusan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Pengurus Perbanas, termasuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas selama tahun buku 2021.

RUA Perbanas juga mengesahkan Laporan Keuangan Perbanas tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Ribka Aretha & Rekan dengan pendapat wajar sesuai dengan surat tertanggal 27 April 2022. RUA Perbanas juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas Perbanas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo berpesan agar industri perbankan berhati-hati dalam penyaluran kredit. Hal ini terkait dengan terjadinya perang Rusia – Ukraina yang berimbas secara ekonomi. Juga perubahan yang terjadi sebagai akibat dari transformasi digital dan perubahan sistem digital. “Ini juga menjadi peluang. Kita harus bersama-sama menyikapi perubahan yang terjadi,” ujar Kartika.

Kartika juga berharap perbankan nasional berhati-hati dalam membuat kebijakan di tengah *recovery* pasca-pandemi Covid-19 yang terdistorsi oleh berbagai isu, serta adanya tekanan-tekanan lain, seperti inflasi global.

Sekjen Perbanas Anika Faisal pada kesempatan yang sama melaporkan berbagai kegiatan yang dilakukan pengurus Perbanas sepanjang tahun 2021. Selain melakukan tiga kali rapat koordinasi dengan Badan Pengurus, digelar juga



program prioritas yang dilaksanakan di berbagai bidang, antara lain vaksin sektor jasa keuangan dan vaksin gotong royong, pertemuan OJK secara virtual, dan juga membahas tentang restrukturisasi pertumbuhan kredit serta pertumbuhan konsumen.

Khusus bidang organisasi dan kelembagaan, selain menyelenggarakan RUA Perbanas tahun 2021, Sekjen Perbanas juga melakukan komunikasi dengan Sekjen ABA (*Asean Banker Association*) membahas rencana pelaksanaan

ASEAN Banking Council (ABC) Meeting ke-50 di Labuan Bajo pada 30 November - 2 Desember 2022.

Bidang lain yang dibahas Sekjen antara lain bidang bidang pengembangan kajian hukum dan peraturan dengan melakukan rapat dengar pendapat dengan OJK, serta berbagai diskusi virtual terkait rancangan POJK, perlindungan nasabah, dan implementasi cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan, serta menjadi koresponden survei terkait *climated-relate considerations in financial policy* dari IFC (*International Finance Corporation*).

Di bidang kajian ekonomi dan perbankan, Perbanas memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan selama pandemi Covid-19. Selain itu, Perbanas hadir dalam pertemuan dengan Presiden RI terkait optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bidang kajian juga mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 98/2020 dan PMK 32/2021, serta melakukan CEO Forum dengan topik "The Future Banking-How Bank Stay Relevant". Bidang pengkajian juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan cetak biru SDM sektor jasa keuangan (SJK) yang diinisiasi oleh OJK dan secara intensif berdiskusi dengan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak Kemenkeu RI atas RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Task force kajian riset yang berada di bawah pengelolaan bidang pengkajian dan ekonomi perbankan juga melakukan kajian tentang potensi pertumbuhan kredit di sektor ekonomi, tentang penelitian terkait UMKM bersama INDEF yang hasilnya diharapkan selesai dalam semester 1 2023," urai Anika.

Bidang *operation, technology, dan reporting*, lanjut Anika, selama tahun 2021 telah membangun komunikasi dan kontribusi aktif dengan ASPI dan BI, serta memberikan masukan terkait pembayaran, khususnya terkait program BI Fast. Bidang *operation* juga telah menyelenggarakan "Data Privacy Webinar Series 1-Personal Data Protection di Era Digital", sebagai *keynote speaker* dalam Institute of Social Economic Digital (ISED) *webinar series*, dan menjadi narasumber dalam Bisnis Indonesia's Webinar.

Badan Pengawas Perbanas menilai dalam kurun satu tahun, dari Januari 2021 - Desember 2021, Pengurus Perbanas telah menjalankan tugasnya dengan baik. Langkah-langkah yang telah dilakukan telah selaras dengan pandangan Badan Pengawas. Namun, mengingat masih adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM maka kegiatan yang dilakukan selama 2021 tentunya belum bisa optimal.

"Kami berharap, di tahun 2022 kegiatan dapat lebih ditingkatkan dan tentunya bisa memberi bantuan kepada anggota dan *stakeholder* pemerintah," ujar Chandra Hamzah yang mewakili Badan Pengawas Perbanas. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010, (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya; dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

TAHUN 2021 Rp. 1.465.989.385.367

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021.

Program IBI Hadapi Tantangan dan Peluang Baru di Tahun 2023

Tantangan-tantangan baru pasca-pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik akibat perang Rusia – Ukraina menjadi *booster* inflasi di seluruh dunia. Bagaimana sebaiknya bankir-bankir anggota IBI menyikapi hal ini?

Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Haryanto T. Budiman mengingatkan, bankir-bankir di Indonesia harus siap menghadapi tantangan baru di tahun 2023. Tidak hanya mengenai kondisi global saat ini yang tidak menentu, yang menyebabkan bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan kebijakan *unwinding stimulus*, tapi juga kondisi geopolitik sebagai akibat perang Rusia – Ukraina. Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama dua tahun lebih, seperti dampak *lock down* di China.

“Semua itu menyebabkan adanya *booster* untuk inflasi. Perang Rusia – Ukraina menyebabkan kenaikan inflasi lebih tinggi lagi,” ujar Haryanto T. Budiman saat memberikan *opening speech* pada acara Halal Bihalal IBI di Jakarta, Senin, 31 Mei 2022.

Selain tantangan-tantangan baru tersebut, menurut Haryanto, saat ini juga muncul peluang-peluang baru, termasuk juga risiko-risiko baru yang akan dihadapi ke depan. Hal ini terkait adanya tren digitalisasi yang semakin marak dan meningkat, isu-sustainability yang menjadi semakin penting dan menjadi perhatian para *stakeholders*, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadikan peningkatan kompetensi menjadi sesuatu yang sangat diperlukan oleh bankir-bankir saat ini dan generasi penerusnya.

“Antisipasi bankir-bankir senior yang memiliki jam terbang yang lebih tinggi sangat diperlukan untuk bisa menciptakan kader-kader bankir yang andal di

masa yang akan datang,” tegas Haryanto.

Untuk itu, kata dia, IBI akan terus meningkatkan jumlah keanggotaannya, dengan target tambahan para bankir muda dengan memudahkan proses untuk menjadi anggota dan juga mengurangi beban biaya keanggotaan bagi mereka. “Bidang keanggotaan dan advokasi di bawah Pak Anggoro (Anggoro E. Cahyo) bekerja sama dengan sekretariat IBI di bawah kepemimpinan Direktur Eksekutif yang baru, Pak Eko Taufik (Eko Taufik Wibowo), akan menyusun *value proposition* serta skema iuran keanggotaan yang baru untuk menarik dan memudahkan bankir-bankir muda menjadi anggota IBI,” papar Haryanto.

IBI, lanjut Haryanto, juga akan terus menyelenggarakan program-program peningkatan kompetensi bankir, termasuk juga program *refreshment executive* dengan topik-topik yang relevan bagi semua anggota. Misalnya terkait digitalisasi, *block chain*, *crypto*, *cyber security*, *social engineering*, *identity theft*, *money laundering*, *counter terrorist financing*, dan juga topik mengenai ESG (*Environmental, Social, & Governance*) yang menjadi semakin penting saat ini.

Program riset terkait topik-topik terkini, kata Haryanto, juga akan terus dikembangkan, bekerja sama dengan universitas ternama. Selain itu, IBI juga akan mengaktifkan kembali berbagai kegiatan sosial, termasuk donor darah bankir, yang sempat tertunda selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. Di antaranya melakukan dan melanjutkan program Bankir Peduli dengan memberikan santunan kepada para anak yatim dan kaum dhuafa di bulan suci Ramadhan.

Program kuliah umum di berbagai universitas dengan topik-topik perbankan terkini, lanjut Haryanto, juga akan kembali dilakukan secara *offline*. Hal ini dilakukan untuk menarik minat mahasiswa agar memiliki keinginan untuk berkarya di industri perbankan setelah mereka lulus nanti. Program olahraga untuk meningkatkan

kebersamaan, seperti *golf*, *running*, atau *hiking*, juga akan dilakukan dalam waktu dekat.

Haryanto berharap, bankir-bankir anggota IBI berpartisipasi menyukseskan program-program tersebut agar hubungan sesama bankir nasional semakin cair ke depannya. Untuk itu, dukungan dari seluruh anggota IBI terkait skema iuran baru sangat diperlukan. Sebagai organisasi milik bersama, kegiatan yang dilakukan oleh IBI sangat bergantung pada dukungan anggotanya.

“IBI adalah organisasi dari kita untuk kita. Dukungan dan masukan dari Bapak/Ibu semua sangat kami harapkan agar IBI bisa memberikan kontribusi optimal bagi perkembangan industri perbankan nasional ke depan,” tutup Haryanto. ■



Bankir dari Tiga Asosiasi Gelar Donor Darah

Setelah vakum sejak pandemi Covid-19, IBI kembali menggelar aksi sosial bertajuk #YUKDONORDARAH. Ada 500 lebih bankir yang datang untuk berdonor darah serta memberikan donasi ke PMI.

Aksi sosial Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dilakukan bersama Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Bankers Association for Risk Management (BARa) dengan mengajak bankir-bankir Indonesia untuk berdonor darah dan memberikan donasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Bertempat di Menara BTN Jakarta, kegiatan sosial yang digelar pada Kamis, 29 September 2022 itu dihadiri lebih dari 500 bankir dari bank-bank di Indonesia.

Acara #YUKDONORDARAH terlihat meriah dengan kehadiran M Jusuf Kalla selaku Ketua PMI, Haryanto T. Budiman selaku Ketua Umum IBI, Rita Mirasari selaku Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas, Agus Sudiarto selaku Ketua Umum BARa, dan Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama Bank BTN beserta jajaran direksi dan komisaris.

Selaku "Tuan Rumah", Haru Koesmahargyo diberi kesempatan memberikan kata sambutan di awal acara. Dia merasa *surprise* dengan antusiasme bankir-bankir untuk ikut donor darah hingga mencapai lebih dari 500 bankir. "Ini wujud kepedulian bankir kepada sesama," ujar Haru.

Menurut Wakil Sekjen Perbanas, Rita Mirasari, kegiatan donor darah merupakan kegiatan rutin IBI. Tahun ini untuk kali pertama digelar sejak pandemi. Berkolaborasi dengan Perbanas dan BARa, Rita berharap kegiatan donor darah tersebut dapat memberi manfaat dan sebagai inspirasi bankir untuk selalu berbagi.

"Acara ini merupakan kolaborasi yang baik dari tiga asosiasi perbankan, yaitu IBI, Perbanas, dan BARa. Kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat dan sebagai wadah bagi masyarakat terutama bankir untuk berbagi dan menolong sesama," sambung Haryanto Budiman, Ketua Umum IBI.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang hadir di acara mengucapkan terima kasih kepada para bankir yang tergabung dalam tiga asosiasi tersebut. Dia berpesan, semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan demi kebaikan masyarakat banyak.

Kegiatan donor darah IBI ini, menurut Direktur Eksekutif IBI, Eko Taufik Wibowo, merupakan program kerja Bidang Sosial IBI. "Mudah-mudahan dapat dilaksanakan setiap tahun," ujar Eko Taufik Wibowo.



Dalam acara ini, juga turut diberikan bantuan senilai Rp200 juta dari ketiga asosiasi kepada PMI. Bank BTN juga turut memberikan perlengkapan medis donor darah sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporat (CSR).

Usai menerima donasi secara simbolis, Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara donor darah tersebut. Menurutnya, idealnya tersedia 2% kebutuhan kantong darah dari total populasi di satu daerah. "DKI Jakarta saja, setiap harinya membutuhkan 1.000 kantong darah," ungkap JK, sapaan akrab mantan Wapres itu. ■

Perbanas, Aftech, dan Kadin Sepakat Percepat Inklusi Keuangan Digital

Perbanas, Aftech, dan Kadin Indonesia berkomitmen membuat langkah strategis untuk mensukseskan inovasi digital demi mendukung pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyepakati lima area strategis dalam upaya mempercepat literasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia. Kelima area strategis yang tercakup dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu sebagai berikut.

Pertama, kolaborasi dalam merumuskan skema dan standar kompetensi talenta digital, terutama di ekosistem bank digital Indonesia. Kedua, kolaborasi penyusunan *roadmap* dan riset terkait bank digital yang melibatkan industri perbankan dan ekosistem digital di Indonesia, untuk mendukung strategi percepatan inklusi keuangan digital.

Ketiga, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk jasa keuangan berizin resmi dari regulator, untuk mencegah aktivitas jasa keuangan yang tidak sesuai peraturan undang-undang. Keempat, partisipasi aktif bersama regulator dalam memberikan masukan terkait regulasi maupun kode etik. Kelima, kolaborasi dalam kegiatan publikasi dan edukasi literasi keuangan dan digital.

Komitmen ini merupakan langkah strategis antara Aftech, Perbanas, dan Kadin Indonesia untuk menyukseskan inovasi digital demi mendukung pembangunan ekonomi digital di Indonesia. "Harapannya, industri ini dapat bertumbuh bersama untuk kebaikan Indonesia," ujar Sekjen Perbanas Anika Faisal di Jakarta, Jumat, 9 September 2022.

Komitmen bersama ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. "Tidak hanya bagi para pengguna, tapi juga industri, dan juga kepada bangsa dan negara dalam hal inklusi keuangan dan literasi keuangan khususnya di era digital," tambah Sekretaris Jenderal Aftech, Budi Gandasoebata.



Wakil Kepala Badan III Sistem Pembayaran Digital dan Neobank Kadin Indonesia, Kaspar Situmorang, menyampaikan, peningkatan transaksi melalui dunia digital harus diikuti dengan peningkatan literasi dan inklusi dunia keuangan. "Sehingga edukasi secara meluas perlu dilakukan, Melalui komitmen bersama ini maka kita akan semakin solid untuk berbagi peran mendorong percepatan literasi keuangan di masyarakat," katanya.

Menurut Kaspar, Indonesia sedang memasuki dunia *digital financing services*, seiring dengan perubahan perilaku konsumen ke digital. Jumlah bank digital sudah mencapai 14 bank, naik dua kali lipat dibanding tahun 2021 yang baru ada 7 bank digital. Nilai transaksi bank digital pada tahun 2021 mencapai Rp39.841 triliun atau tumbuh 45,64% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Dengan itu, kesepakatan bersama antara ketiga belah pihak ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, sehingga talenta digital dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan transformasi digital. ■

Aturan Spin Off UUS Menanti Ketok Palu

Ada kabar gembira bagi industri perbankan nasional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Sebelum tahun 2022 berakhir, peraturan terkait rencana spin off UUS akan diketok DPR.

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang didalamnya juga mengatur soal *spin off* unit usaha syariah (UUS) bank umum konvensional akan diketok palu alias disahkan menjadi undang-undang (UU) sebelum 2022 berakhir. Hal itu disampaikan Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI dalam Islamic Finance Summit 2022 yang digelar Infobank Media Group dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Bali, Kamis, 22 September 2022.

“Soal spin off, sampai hari ini konsep yg kita serahkan ke pemerintah, 50 persen dari aset bank induk dan tidak ada batas waktu. Kita sedang menunggu kelanjutan dari RUU ini dari pemerintah. DPR komitmen P2SK akan kita selesaikan Desember 2022. Insya Allah, November setelah reses, kita langsung bahas. Sebelum 15 Desember 2022, reses berikutnya, PPSK akan kita selesaikan,” ujar Fathan.

Dia juga menambahkan, pada Selasa, 20 September lalu, dalam Sidang Paripurna DPR, RUU P2SK telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, RUU ini akan diserahkan kepada pemerintah yang diwakili oleh presiden. “Nanti pemerintah akan pelajari. Kabarnya Presiden akan mengutus menteri keuangan untuk berkoordinasi dengan DPR dan stakeholder lain seperti OJK, BI, dan LPS,” tambah Fathan.

Spin off UUS bank menjadi perbincangan hangat di kalangan industri perbankan. Seperti diketahui, berdasarkan UU Perbankan Syariah tahun 2008, bank-bank yang memiliki UUS diwajibkan untuk memisahkan atau spin off UUS-nya menjadi bank syariah tersendiri paling lambat pada 2023. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah bank pemilik UUS karena, salah satunya terbentur kendala permodalan.

Di lain sisi, sejumlah kalangan juga menilai, UUS yang dipaksa spin off harus di 2023 dikhawatirkan justru akan mengalami kemunduran karena skala ekonomi yang kecil begitu menjadi bank tersendiri. Sebab, dengan begitu, bank baru hasil spin off tidak serta merta punya kekuatan besar baik dari sisi permodalan maupun infrastruktur.

Salah satunya, dengan latar belakang kondisi seperti itu, dalam draf RUU P2SK, poin tentang spin off UUS mengalami perubahan dari UU Perbankan Syariah. Dalam draf RUU P2SK disebutkan spin off bisa dilakukan jika aset UUS sudah mencapai 50 persen dari bank induknya, tanpa ada deadline atau batas waktu.

Sejauh ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu kepastian terkait dengan adanta wacana penghapusan kewajiban spin-off UUS. Pasalnya, kehadiran RUU P2SK tersebut menjadi harapan baru bagi para perbankan syariah, khususnya UUS yang saat ini tengah menghadapi tenggat untuk melakukan spin-off dari bank induknya pada tahun 2023 sesuai amanat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan, kebijakan spin off memang harus dipertimbangkan jika justru kebijakan ini melemahkan UUS nya sendiri. “Sehingga saya ingin melihat kondisi tertentu yang lebih baik dulu kemudian di spin-off. kan kita ingin memastikan bahwa perkembangan bank syariah itu akan berjalan dengan

lebih baik ke depannya,” ujar Dian.

Dirinya mengungkapkan, bahwa ke depannya bank syariah dalam skala yang sama seperti BSI (Bank Syariah Indonesia) harus ditambah sebanyak dua atau tiga lagi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan konsolidasi bank syariah akan terjadi kembali.

“Nanti formatnya dan lain sebagainya masih kita rumuskan tetapi ini untuk kepentingan pengembangan bang syariah ke depan. Saya ingin melihat bank-bank syariah ini tidak dalam skala kecil tapi juga dalam skala besar,” ungkapnya.

Sehingga, tambah dia, bank syariah akan bisa lebih kompetitif dengan sesama bank syariah maupun bank konvensional. “Bank syariah ini kan alternatif, jadi kan ini sangat inklusif siapapun bisa memanfaatkan bank syariah, tidak harus umat Islam yang memanfaatkannya. Kita ingin melihat bank syariah dan bank konvensional ini tumbuh sama-sama besar dan sama-sama sehat,” tutupnya. ■



The Psychology of Money: Soft Skill Mengelola Uang

Mengelola uang dengan baik ternyata tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Tapi, lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Masalahnya, perilaku sulit diajarkan, bahkan kepada orang sangat cerdas.

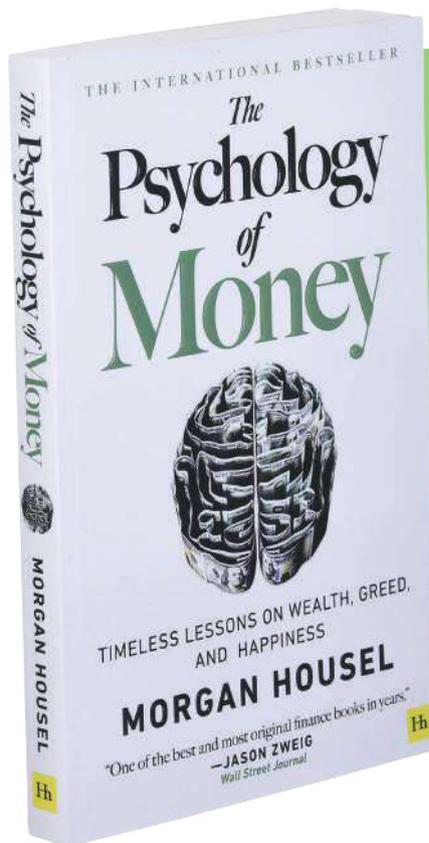
Buku "The Psychology of Money" diawali dengan kisah epik Ronald James Read. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Pria kelahiran Vermont, Amerika Serikat, itu hidupnya sangat bersejarah, sejak kecil. Ketika SMA, dia harus mencari tumpangan mobil orang untuk bisa pergi ke sekolah. Di keluarganya, dia orang pertama yang lulus SMA.

Orang-orang yang mengenal Read bersaksi, dia hidup dalam kesederhanaan, sepanjang umurnya. Dia bekerja di sebuah pom bensin, memperbaiki mobil, selama 25 tahun. Selanjutnya menjadi petugas kebersihan. Selama 17 tahun dia menjadi penyapu lantai di JCPenney.

Rumahnya juga sangat sederhana. Rumah dua kamar seharga 12 ribu dolar AS atau setara Rp168 juta (dengan kurs Rp14 ribu per 1 dolar AS). Dia menempati rumah itu sepanjang hidupnya. Bersama istrinya, yang kemudian meninggal saat Read berusia 50 tahun, dan tak menikah lagi. Dia tinggal bersama anak-anak tirinya. Dia tak mempunyai hobi. "Kesenangannya hanya memotong kayu bakar," ungkap seorang kawannya.

Hingga tahun 2014, saat Read meninggal di usia 92 tahun, seluruh penjuru Amerika membicarakannya. Petugas kebersihan bersejarah dari desa itu membuat berita menghebohkan di media massa: Seorang Petugas Kebersihan Meninggalkan Harta Warisan Sebesar 8 Juta Dolar AS!

Ya, saat Read meninggal, dia meninggalkan surat wasiat yang isinya tentang harta warisan yang dia tinggalkan. Tak tanggung-tanggung, jumlah 8 juta dolar AS atau setara Rp112 miliar. Di tahun 2014, ada 2.813.503 orang Amerika yang meninggal dunia. Hanya sekitar 4.000



Judul Buku : ***The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness***

Penulis : **Morgan Housel**
 Penerbit : **Harriman House**
 Tahun : **8 September 2020**
 Bahasa : **English**
 Halaman : **256 Halaman**
 ISBN-10 : **0857197681**
 ISBN-13 : **978-0857197689**
 Dimensi : **14 x 21.5 cm**

orang yang memiliki harta peninggalan di atas 8 juta dolar AS. Read menjadi salah satunya.

Yang lebih menghebohkan lagi, Read mewariskan 8 juta dolar AS itu kepada anak-anak tirinya sebesar 2 juta dolar AS dan sisinya, 6 juta dolar AS, dia sumbangkan ke rumah sakit dan perpustakaan di kota tempat tinggalnya. Dia pun dikenang dengan nama baik sebagai filantropis.

Tak berhenti sampai di situ. Orang-orang yang mengenal Read sepanjang hidupnya bertanya-tanya: dari mana Read bisa memperoleh kekayaan

sebanyak itu hanya dengan bekerja sebagai petugas kebersihan? Apa rahasianya?

Read tak pernah pasang atau menang lotere. Dia juga tak dapat warisan. Usut punya usut, ternyata ini rahasia Read bisa mengumpulkan kekayaan hingga ratusan miliar: menabung. Sangat klasik, tapi begitulah adanya. Dia selalu menabung, dengan menyisihkan sebagian dari berapa pun yang dia dapat. Dan, inilah rahasia berikutnya: uang dari hasil menabung dia investasikan di saham *blue chip*. Dia biarkan bertahun-tahun, hingga terus berlipat menjadi 8 juta dolar AS.

Kisah Ronald Read menjadi begitu satire, sebab lima bulan sebelumnya publik Amerika dihebohkan dengan sidang kebangkrutan Richard Fuscone. Eksekutif Merrill Lynch lulusan Harvard University bergelar MBA itu sukses berkariir di bidang keuangan hingga bisa

pensiun di usia 40-an tahun untuk menjadi filantropis.

"Keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadi Fuscone," ujar mantan CEO Merrill Lynch, David Komansky, saat mengulas keberhasilan sosok Fuscone di usia muda. Bahkan, Majalah bisnis *Crain's* pernah memasukkan Fuscone sebagai pebisnis sukses di bawah usia 40 tahun.

Pada tahun 2005 Fuscone meminjam banyak uang dari bank untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, Connecticut. Rumah dengan 11 kamar mandi, dua lift, dua kolam renang, dan tujuh garasi itu menghabiskan biaya pemeliharaan 90 ribu dolar AS atau setara Rp1,26 miliar per bulan.

Tahun 2008 krisis keuangan melanda dunia dan menghajar keuangan hampir semua orang. Tak terkecuali Fuscone. Kehidupan yang dijalani dengan menghambur-hamburkan uang membuatnya hancur. Utang besar dan aset tak likuid membuatnya bangkrut. "Sekarang saya tak punya pendapatan," ujarnya di depan hakim perkara kebangkrutan di tahun 2008.

Tahun 2014, sekitar lima bulan sebelum Ronald Read meninggal, rumah mewah satu-satunya yang tersisa milik Fuscone disita untuk membayar utang-utangnya. Rumah yang menjadi saksi bagaimana cara seorang eksekutif kaya raya menghabiskan harta kekayaan secara arogan. Rumah yang juga menjadi saksi bagaimana kejatuhan Fuscone.

Morgan Housel, penulis buku *The Psychology of Money*, mengangkat dua kisah orang di atas sebagai pelajaran bahwa: mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tapi lebih berhubungan dengan perilaku, dan perilaku sulit diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat pintar.

Yang membuat perbedaan besar antara Read dan Fuscone bukan pada pendidikan atau pengalaman kerja keduanya. Itu sama sekali tidak berpengaruh. Perbedaan besar kedua orang ini adalah: Ronald Read sabar, Richard Fuscone tamak.

Namun, Morgan Housel mewanti-wanti juga bahwa, bukan berarti dirinya menyarankan pembaca untuk meniru Ronald Read dan jangan seperti Richard Fuscone, meski itu bukan nasihat buruk.

Dalam pandangan Housel, ada dua penjelasan terkait dengan dua peristiwa yang menyangkut soal pengelolaan keuangan tersebut. Pertama, hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu benar sampai batas tertentu. Atau, yang kedua, keberhasilan finansial bukan sains keras, melainkan keahlian lunak (*soft skill*), di mana perilaku seseorang lebih penting daripada pengetahuannya.

Housel kemudian menyebut *soft skill* itu sebagai "psikologi uang", yang menjadi judul buku *international bestseller* dan telah diterjemahkan ke 26 bahasa ini. Itulah mengapa Housel menghadirkan kisah-kisah nyata terkait keuangan dalam buku setebal 238 halaman ini, dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa keahlian lunak lebih penting daripada segi teknis keuangan.

"Kisah-kisah pendek dalam buku ini saya yakini mampu membantu pembaca membuat keputusan finansial lebih baik," ujar Housel dalam kata pengantarnya.

Housel merasa terpancang untuk menulis buku ini karena keahlian lunak tersebut saat ini kurang mendapat apresiasi di dunia kerja ketimbang keahlian berbasis matematis. Dia merasa, semakin banyak belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, membuatnya semakin menyadari bahwa cara memahami masalah keuangan dengan lebih baik adalah melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan melalui lensa keuangan.

Untuk memahami mengapa seseorang sampai terjebak utang, misalnya, tak perlu belajar tentang suku bunga, tapi perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Untuk memahami mengapa seorang investor menjual saham dalam keadaan pasar lesu (*bearish*), tak perlu belajar matematika harapan hasil masa depan, tapi perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apa investasi Anda mengancam masa depan mereka?

House menyajikan 20 kisah nyata yang terjadi di sekitarnya, dan diharapkan bisa menjadi alat pengasah *soft skill* para pembaca buku ini. Di kisah ke-20, sebagai penutup, dia menghadirkan sosok Sandy Gottesmen, seorang miliarder dan investor pendiri grup konsultan First Manhattan.

Gottesmen, konon, hanya mengajukan satu pertanyaan saat mewawancarai calon anggota tim investasinya, "Apa yang Anda miliki, dan mengapa?" Bukan "Saham apa yang Anda anggap murah?" atau "Ekonomi negara mana yang akan resesi?"

Dengan pertanyaan itu, dia berharap bisa mengetahui perilaku calon anggota tim investasinya dalam menggunakan uang pribadi mereka, dan hal itu akan

berhubungan dengan bagaimana nanti mereka akan mengelola uang investasinya. Pertanyaan itu juga bisa menjadi pembeda antara apa yang masuk akal (apa yang orang sarankan agar Anda melakukan) dan apa yang terasa benar bagi mereka (apa yang benar-benar mereka lakukan).

Tesis Gottesmen ini terbukti. Berdasarkan riset Morningstar tahun 2016 bertajuk "Portofolio Managers Shun Investing in Own Funds" mengungkapkan, separuh dari semua manajer portofolio reksa dana mutual tidak menanamkan uang sendiri di reksa dana yang dikelolanya. Ini mirip esai "How Doctors Die" yang ditulis Ken Murray, profesor kedokteran di USC pada 2011, yang menunjukkan bagaimana dokter memilih berbagai perawatan akhir hidup untuk dirinya sendiri dan berbeda dengan yang disarankan untuk pasien mereka.

Perbedaan antara apa yang seseorang sarankan dan apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri tak selalu buruk. Itu hanya menunjukkan bahwa ketika menghadapi masalah rumit dan emosional yang mempengaruhi Anda dan keluarga Anda, tidak ada satu jawaban yang benar. Tidak ada kebenaran universal. Hanya ada apa yang mempan untuk Anda dan keluarga, memastikan Anda nyaman dan bisa tidur nyenyak pada malam hari. ■

**BERDASARKAN RISET
MORNINGSTAR TAHUN 2016
BERTAJUK "PORTOFOLIO
MANAGERS SHUN INVESTING IN
OWN FUNDS" MENGUNGKAPKAN,
SEPARUH DARI SEMUA MANAJER
PORTOFOLIO REKSA DANA
MUTUAL TIDAK MENANAMKAN
UANG SENDIRI DI REKSA DANA
YANG DIKELOLANYA.**

Perajin Perak di Ceruk dan Transformasi Ekonomi Bali

Transformasi ekonomi yang digaungkan Pemprov Bali pasca-pandemi Covid 19 akan berdampak pada sektor pariwisata dan pendukungnya. Bagaimana nasib perajin perak di Pulau Dewata itu?

PANDEMI Covid-19 benar-benar memukul perekonomian Bali. Provinsi yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini terlalu bergantung pada sektor pariwisata, sehingga saat ada pembatasan mobilitas, sektor pariwisata lumpuh. Ekonomi Bali pun terpuruk. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyusun konsep baru untuk pengembangan perekonomian Bali ke depan.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, sekitar 54% perekonomian Bali dikontribusikan sektor pariwisata. Inilah yang lumpuh total selama lebih dari 2 tahun belakangan. Sektor-sektor lain yang berkontribusi 46% terhadap perekonomian Bali pun turut terdampak. Tidak heran bila pada 2020 lalu ekonomi Bali berkontraksi hingga -9,31% (yoy). Meski masih tumbuh negatif, kondisinya mulai membaik pada 2021 dengan pertumbuhan -2,47%, sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi.

Saat ini sektor pariwisata kembali menggeliat. Wayan Koster menyebut pada 18 September 2022 misalnya, kunjungan wisatawan domestik ke Bali mencapai 10.720 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 11.642 orang.

"Karena pariwisata mulai pulih, otomatis berdampak pada pulihnya ekonomi. Kuartal I-2022 tumbuh 1,46% dan kuartal II-2022 tumbuh 3,04%. Biasanya Bali dalam kondisi normal selalu tumbuh di atas angka pertumbuhan nasional. Baru pertama ini di bawah angka nasional. Saya harap kuartal III dan kuartal IV akan terus membaik," ujarnya dalam CEO Sharing dan 13th Infobank BPR Awards yang diselenggarakan di The Stones Hotel, Kuta, Badung, Bali, 21 September 2022.

Belajar dari pandemi COVID-19, Wayan Koster mengungkapkan ke depan pengembangan perekonomian Bali akan diarahkan agar lebih seimbang, tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata dan pendukungnya. Berdasarkan pengalaman historikal, daerah pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal. Baik dari faktor keamanan, bencana alam maupun non alam yang tidak bisa dikontrol.

Kebijakan Pemprov Bali ini tentu akan berdampak pada industri pariwisata dan pendukungnya di Bali. Untuk itu, sebaiknya kebijakan tersebut dilakukan secara selektif dan bijak. Masyarakat Bali yang selama ini hidup dari sektor pariwisata juga tidak bisa serta-merta beralih ke sektor lain untuk mata pencahariannya. Industri pendukung pariwisata yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung



ekonomi Bali juga tak bisa diabaikan.

Salah satu industri pendukung pariwisata di Bali adalah industri kerajinan perak yang selama ini menjadi salah satu souvenir andalan dari Bali. Souvenir perak tak bisa dipisahkan dari industri pariwisata Bali. Sama seperti halnya budaya dan alam Bali.

Salah satu sentra perajin perak dan emas di Bali adalah Desa Ceruk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Desa Celuk mulai di kenal sebagai desa pengrajin emas dan perak sejak tahun 1976. Pada saat itu obyek wisata di Bali mulai di kenal oleh wisatawan mancanegara. Hampir semua penduduk setempat, bekerja sebagai pengrajin perak dan bergerak dalam usaha jual beli perak. Hasil produksi pengrajin di desa Celuk bahkan sudah memasuki pasar nasional maupun internasional.

Apakah masyarakat Desa Ceruk yang sudah familiar dengan industri perak harus berubah mata pencahariannya? Tentu tidak bijaksana jika itu yang dilakukan. Sikap selektif dan bijak dalam menerapkan kebijakan transformasi ekonomi di Bali menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Bagaimana pun, Bali dikenal dunia internasional karena pariwisatanya. Wilayah dan masyarakat yang selama ini menjadi *stakeholders* utama industri pariwisata sebaiknya tetap menggeluti industri pariwisata, bukan dipaksa mencari profesi dan pekerjaan lain. ■

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERBANAS INSTITUTE SEKOLAH PASCASARJANA

Learning from Science and Experience



PERIODE KULIAH

MARET, JULI, NOVEMBER

KULIAH HANYA

1,5 Tahun

WAKTU PERKULIAHAN

PROGRAM KELAS MALAM

Hari Senin - Kamis:

Pukul 18.30 - 21.00 WIB

PROGRAM KELAS AKHIR PEKAN

Hari Sabtu : Pukul 08.00 - 18.00 WIB

PROGRAM STUDI
MAGISTER AKUNTANSI
MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTAN (PPAK)

**CICILAN
BULANAN**

Informasi:

 **Whatsapp**

Consultant Edu Jakarta : 0815 8538 8511

Consultant Edu Bekasi : 0815 8538 8505

 Pendaftaran Online
admisi.perbanas.id

